

BAB VI

KESIMPULAN

Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk, dengan total hingga 253 609.643 orang, tetapi dengan kesempatan kerja terbatas. Keadaan ini membuat Indonesia menjadi negara yang mengirim terlalu banyak pekerja migran ke negara lain, salah satu negara tujuan adalah Malaysia. Ironisnya, Pekerja Indonesia di Malaysia terlibat dalam banyak masalah yang sulit dipecahkan. Banyak PMI menjadi yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh majikannya sendiri.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi warganya di luar negeri. Pada tahun 2006 Indonesia telah membuat Nota Kesepahaman dengan Malaysia yang secara khusus mengatur regulasi perlindungan dan penempatan PMI yang bekerja di sektor domestik khususnya PLRT, namun pada kenyataannya bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia belum maksimal. Upaya diplomatik untuk menyelamatkan PMI dari tindak pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi Dodo yang dilakukan secara *G to G*, tetapi juga Indonesia menerapkan diplomasi multi-jalur terhadap Malaysia untuk beberapa kasus. Di sini ada Migrant CARE sebagai Organisasi non-pemerintah yang berpengaruh dalam menangani kasus-kasus PMI.

Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi sulitnya melindungi PMI di Malaysia yang terkena masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum sepenuhnya berhasil dalam melakukan upaya diplomatik terhadap Malaysia dalam melindungi keberadaan PMI di Malaysia, karena angka pelanggaran HAM yang terjadi di Malaysia masih menunjukkan jumlah yang tidak berkurang secara signifikan. Situasi ini perlu dijadikan pemerintah dalam mengambil langkah yang lebih tegas lagi terhadap Malaysia dalam menegakkan perlindungan

terhadap PMI yang berada di Malaysia. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamankan dan melindungi warganya. Namun, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mendidik rakyatnya. Pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk mekanisme insentif dan program pendidikan publik, dan membangun kemitraan yang kuat dengan BNP2TKI dan juga LSM.

Harus ada peningkatan dalam pengiriman pekerja Indonesia ke luar negeri untuk mencegah masalah baik untuk pemerintah Indonesia dan untuk PMI itu sendiri. Pemerintah Indonesia harus memeriksa kembali agen perekrutan buruh migran, terutama agen swasta yang selalu mengirim banyak pekerja migran Indonesia ilegal ke Malaysia dan mempertahankan agen yang baik untuk mencegah pengiriman PMI ilegal. Dengan sistem perbaikan di dalam negeri atas penempatan PMI, setidaknya dapat mengurangi efek buruk bagi buruh migran Indonesia.

